

Membingkai Negara Hadir bagi Veteran: Collaborative Governance dalam Pemberitaan Media Internal LVRI

Dheny Sugara¹, Enda Suhendra², Maudhy Satyadharma³

¹ PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

² PC Pemuda Panca Marga Kab. Majalengka, Indonesia

³ PD Pemuda Panca Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

Korespondensi: maudhyaudhy@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 11th, 2026

Revised Sept 10th, 2026

Accepted Sept 15th, 2026

Keyword:

Analisis Framing; Collaborative Governance; Keterlibatan Negara; Pemberitaan; Veteran.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media internal Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) membingkai collaborative governance dalam perjuangan pemenuhan hak veteran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen terhadap empat berita veteranri.go.id tahun 2026. Analisis memadukan model framing Robert M. Entman dan perspektif collaborative governance Ansell dan Gash serta Emerson et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa veteran dibingkai sebagai subjek yang memiliki hubungan normatif dengan negara, sementara LVRI dikonstruksikan sebagai aktor advokasi, penghubung, dan penggerak kolaborasi. Kolaborasi melibatkan pemerintah, legislatif, kementerian, dan institusi pelayanan publik melalui dialog, dukungan, komitmen, serta tindakan bersama untuk memperkuat pemenuhan hak veteran.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Veteran Republik Indonesia memiliki posisi khusus dalam kehidupan berbangsa karena keberadaannya berkaitan dengan sejarah perjuangan, pembelaan negara, dan pengorbanan dalam mempertahankan kedaulatan (Putera et al., 2026; Sudarsono et al., 2026). Pengakuan terhadap veteran tidak hanya memiliki dimensi historis dan simbolik, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak, penghormatan, perlindungan, dan kesejahteraan (Baka et al., 2026). Kerangka hukum mengenai veteran diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Pemenuhan hak veteran dalam praktiknya melibatkan berbagai aktor dan institusi. Pemerintah melalui kementerian, lembaga legislatif melalui DPR RI, organisasi veteran melalui LVRI, serta badan atau perusahaan pelayanan publik dapat memiliki peran yang berbeda dalam mendukung kepentingan veteran (Silondae & Satyadharma, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan veteran tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan pemerintahan yang bersifat hierarkis. Sebaliknya, diperlukan hubungan antarlembaga yang memungkinkan terjadinya komunikasi, pertukaran sumber daya, pembangunan kepercayaan, dan tindakan bersama (Kritian & Herlia, 2025).

Perspektif *collaborative governance* relevan digunakan untuk memahami hubungan tersebut. Ansell dan Gash (Islamy H., 2018) menjelaskan collaborative governance sebagai proses pemerintahan yang mempertemukan lembaga publik dengan pemangku kepentingan dalam forum bersama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus. Sementara itu, Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Awaluddin, 2026) mengembangkan kerangka yang menempatkan *principled engagement*, *shared motivation*, *capacity for joint action*, serta *collaborative actions* sebagai unsur penting dalam tata kelola kolaboratif.

Namun, proses kolaborasi tidak hanya berlangsung dalam ruang kelembagaan. Proses tersebut juga dikonstruksikan melalui komunikasi. Media memiliki kemampuan untuk memilih fakta tertentu, memberikan penekanan terhadap aktor tertentu, menentukan hubungan sebab-akibat, serta menawarkan interpretasi terhadap suatu persoalan (Atmadja & Ariyani, 2023; Mursalin & Sulisty, 2026) =.

Dalam hal tersebut, teori framing Robert M. Entman menjadi relevan. Framing merupakan proses memilih aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi. Entman mengidentifikasi empat fungsi utama framing, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan threat recommendation (Hidayat & Prasetyo, 2023). Melalui keempat elemen tersebut, penelitian dapat mengidentifikasi bagaimana suatu media mendefinisikan persoalan veteran, siapa yang ditempatkan sebagai aktor penyebab atau pihak yang bertanggung jawab, nilai moral apa yang ditonjolkan, serta solusi apa yang ditawarkan.

Persoalan menjadi semakin menarik ketika media yang dianalisis bukan media massa independen, melainkan media internal organisasi veteran itu sendiri. **Veteranri.go.id** merupakan media yang berkaitan langsung dengan LVRI (Satyadharma & Silondae, 2026). Dengan demikian, LVRI tidak hanya menjadi subjek pemberitaan, tetapi juga merupakan organisasi yang mengelola ruang komunikasi tersebut.



Gambar 1 Situs DPP LVRI
Sumber : veteranri.go.id (2026e)

Karakter ini menimbulkan kemungkinan adanya framing internal organisasi. Media internal dapat berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi sekaligus sebagai ruang self-representation, pembentukan identitas organisasi, advokasi kepentingan, dan legitimasi kelembagaan (Gillis, 2006). Oleh karena itu, pemberitaan veteranri.go.id penting dianalisis bukan hanya berdasarkan apa yang diberitakan, tetapi juga berdasarkan bagaimana LVRI membingkai hubungan dirinya dengan negara dan lembaga lain.

Empat berita yang menjadi objek penelitian memperlihatkan pola tersebut. Berita mengenai dukungan Wakil Menteri Hukum terhadap percepatan usulan revisi UU Veteran RI menunjukkan adanya hubungan LVRI dengan pemerintah dalam mendorong perubahan kebijakan. Berita mengenai janji Kementerian Pertahanan meningkatkan dukungan kepada LVRI memperlihatkan konstruksi komitmen kelembagaan. Berita mengenai silaturahmi pimpinan DPP LVRI dengan Direktur Utama TransJakarta menunjukkan bentuk kerja sama dengan institusi pelayanan publik. Sementara itu, berita mengenai anggota Baleg DPR RI yang tidak menerima jika nasib veteran diabaikan negara memperlihatkan konstruksi tanggung jawab negara terhadap veteran.

Keempat berita tersebut memperlihatkan aktor yang berbeda, tetapi memiliki pola hubungan yang relatif serupa: LVRI menyampaikan kepentingan → institusi merespons → terbentuk dukungan atau komitmen → diharapkan menghasilkan pemenuhan kepentingan veteran.

Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media internal LVRI membingkai *collaborative governance* dalam perjuangan hak veteran RI. Penelitian secara khusus menganalisis bagaimana persoalan veteran didefinisikan, bagaimana aktor dan tanggung jawab dikonstruksikan, bagaimana hubungan kolaboratif ditampilkan, serta bagaimana solusi terhadap persoalan veteran dibingkai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (Mulyana et al., 2024). Objek penelitian berupa empat berita yang dipublikasikan melalui media internal LVRI, yaitu veteranri.go.id.

Keempat berita tersebut adalah:

1. “Wamenkum RI Dukung Percepatan Usulan Revisi UU Veteran RI”, tautan: <https://veteranri.go.id/wamenkum-ri-dukung-percepatan-usulan-revisi-uu-veteran-ri/> (veteranri.go.id, 2026d);
2. “Kabacadnas Janji Kemhan Akan Tingkatkan Dukungan kepada LVRI”, tautan: <https://veteranri.go.id/kabacadnas-janji-kemhan-akan-tingkatkan-dukungan-kepada-lvri/> (veteranri.go.id, 2026b);
3. “Pimpinan DPP LVRI Silaturahmi kepada Dirut TransJakarta”, tautan: <https://veteranri.go.id/pimpinan-dpp-lvri-silaturahmi-kepada-dirut-transjakarta/> (veteranri.go.id, 2026c); dan
4. “Anggota Baleg DPR RI Tidak Terima Kalau Nasib Veteran RI Diabaikan oleh Negara.”, tautan: <https://veteranri.go.id/anggota-baleg-dpr-ri-tidak-terima-kalau-nasib-veteran-ri-diabaikan-oleh-negara/> (veteranri.go.id, 2026a).

Pemilihan keempat berita dilakukan secara purposif karena seluruhnya memperlihatkan hubungan LVRI dengan aktor eksternal dalam konteks pemenuhan kepentingan veteran. Analisis menggunakan dua kerangka teoritis. Pertama, model framing Robert M. Entman yang meliputi:

1. *Define problems* – bagaimana persoalan veteran didefinisikan;
2. *Diagnose causes* – bagaimana penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dikonstruksikan;
3. *Make moral judgment* – nilai moral yang digunakan untuk menilai persoalan;
4. *Threat Recommendation* – solusi yang ditawarkan melalui pemberitaan.

Kedua, perspektif *collaborative governance* terutama menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (Ardiansyah et al., 2025) meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil antara, serta Emerson et al. (Jamhur, 2024), terutama *principled engagement*, *shared motivation*, *capacity for joint action*, dan *collaborative actions*.

Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, membaca setiap berita secara menyeluruh dan mengidentifikasi aktor, isu, diksi, pernyataan, bentuk hubungan kelembagaan, serta tindakan yang diberitakan. Kedua, mengklasifikasikan temuan berdasarkan empat elemen framing Entman (Udin, 2026). Ketiga, menghubungkan setiap elemen framing dengan dimensi *collaborative governance* untuk menemukan pola konstruksi kolaborasi dalam pemberitaan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kolaborasi secara empiris. Fokus penelitian adalah bagaimana *collaborative governance* direpresentasikan dan dibingkai oleh media internal LVRI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Veteran sebagai Persoalan Tanggung Jawab Negara

Frame pertama yang muncul adalah konstruksi veteran sebagai kelompok yang memiliki hubungan normatif dengan negara. Hal tersebut terlihat kuat dalam berita mengenai anggota Baleg DPR RI yang menyatakan tidak menerima apabila nasib veteran diabaikan oleh negara.

Pemberitaan tersebut tidak sekadar menampilkan kondisi veteran sebagai persoalan kesejahteraan individu. Persoalan tersebut menempatkan veteran sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap kelompok yang telah memberikan kontribusi dalam sejarah perjuangan bangsa.

Dengan menggunakan model Entman, *problem definition* dalam pemberitaan tersebut adalah adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara penghormatan normatif terhadap veteran dengan kondisi atau pemenuhan hak yang diterima veteran. Dalam hal ini, veteran tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai kelompok yang memiliki legitimasi historis untuk memperoleh perhatian dan perlindungan negara (Baka et al., 2026).

Dalam perspektif *collaborative governance*, frame tersebut penting karena persoalan veteran dikonstruksikan sebagai persoalan bersama, bukan semata-mata persoalan internal LVRI (Afandi et al., 2026). Kehadiran anggota legislatif dalam pemberitaan memperlihatkan bahwa kepentingan veteran dibawa ke dalam ruang kelembagaan yang memiliki kewenangan politik dan kebijakan.

Frame tanggung jawab negara juga memperlihatkan adanya pergeseran makna veteran dari sekadar simbol sejarah menuju subjek kebijakan publik. Melalui pemberitaan internal, LVRI menghubungkan penghormatan terhadap jasa veteran dengan kewajiban institusional negara (Satyadharma & Anwar, 2025). Konstruksi tersebut memperkuat legitimasi tuntutan veteran karena persoalan kesejahteraan dan hak ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab bersama. Dengan demikian, media internal LVRI membangun persepsi bahwa kehadiran negara pada veteran perlu diwujudkan melalui kebijakan, pelayanan, dan perlindungan yang nyata (Barmuddin & Safitri, 2026).

Dengan demikian, pemberitaan tersebut menghasilkan konstruksi bahwa penghormatan terhadap veteran tidak cukup diwujudkan melalui simbol atau seremoni, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan kelembagaan yang konkret. Di sinilah framing media internal LVRI bertemu dengan prinsip *collaborative governance*, yaitu adanya kebutuhan untuk mempertemukan berbagai aktor agar persoalan veteran dapat memperoleh respons kebijakan yang lebih komprehensif (El Yana, 2025).

Revisi UU sebagai Bentuk Collaborative Governance

Berita mengenai dukungan Wakil Menteri Hukum terhadap percepatan usulan revisi UU Veteran RI menunjukkan bentuk kolaborasi pada tingkat kebijakan. LVRI ditempatkan sebagai aktor yang membawa aspirasi dan kebutuhan perubahan regulasi, sedangkan pemerintah dan DPR RI ditempatkan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam proses legislasi.

Dengan demikian, terdapat pembagian peran:

1. LVRI → menyampaikan aspirasi dan kepentingan veteran
2. Kementerian Hukum → memberikan dukungan dan fasilitasi
3. DPR RI → memiliki kewenangan legislasi

Pola tersebut menunjukkan unsur *principled engagement* dalam *collaborative governance*. Interaksi berlangsung melalui komunikasi, penyampaian kepentingan, pembahasan masalah, dan pencarian kemungkinan tindakan bersama (Awaluddin, 2026). Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa LVRI tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang aktif membawa kepentingan veteran ke dalam proses kebijakan (Barmuddin et al., 2025).

Menariknya, pemberitaan tidak membingkai hubungan LVRI dan pemerintah sebagai hubungan konflik. Sebaliknya, relasi tersebut dikonstruksikan sebagai hubungan dialogis dan solutif. Dukungan dari pejabat pemerintah menjadi elemen penting dalam membangun frame bahwa pemerintah memiliki keterbukaan terhadap aspirasi veteran (Ghoezali, 2025).

Framing tersebut menunjukkan bahwa perjuangan revisi regulasi tidak dikonstruksikan sebagai tekanan sepihak dari LVRI kepada pemerintah. Sebaliknya, proses legislasi digambarkan sebagai ruang pertemuan kepentingan yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan dukungan antarlembaga (Suwarlan, 2026). Dalam perspektif *collaborative governance*, pola ini menunjukkan pentingnya komunikasi awal dalam membangun agenda bersama (Wulandjani et al., 2025). Media internal kemudian memperkuat narasi bahwa perubahan kebijakan dapat dicapai melalui dialog, fasilitasi, dan koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan (Purwanto et al., 2025).

Dalam kerangka Entman, solusi (*treatment recommendation*) yang ditawarkan bukan hanya perubahan norma hukum, tetapi juga penguatan koordinasi antara LVRI, pemerintah, dan DPR RI. Dengan demikian, revisi undang-undang dibingkai sebagai hasil yang diharapkan dari proses kolaboratif (Dharmawan et al., 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa media internal LVRI membangun narasi bahwa advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Strategi tersebut memperlihatkan posisi LVRI sebagai *bridging actor*, yaitu aktor yang menghubungkan pengalaman dan kepentingan veteran dengan institusi yang memiliki kewenangan membuat kebijakan (Silondae & Satyadharma, 2025).

Dukungan Kemhan sebagai *Shared Motivation*

Berita mengenai dukungan Kementerian Pertahanan kepada LVRI memperlihatkan frame lain, yaitu komitmen kelembagaan.

Dalam pemberitaan tersebut, dukungan pemerintah dikaitkan dengan kontribusi veteran terhadap negara. Dengan demikian, terdapat hubungan antara:



Gambar 2 Hubungan antara Jasa Veteran, Pengakuan Negara, Dukungan Pemerintah dan Keberlanjutan Organisasi veteran
Sumber : Data diolah (2026)

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Emerson et al. (Awaluddin, 2026), konstruksi tersebut berhubungan dengan konsep *shared motivation*, terutama unsur kepercayaan, legitimasi, saling memahami, dan komitmen.



Gambar 3 Bacadnas menyatakan dukungan lebih besar Kemenhan RI terhadap organisasi Veteran
Sumber : veteranri.go.id (2026b)

Pemberitaan membangun pemahaman bahwa pemerintah dan LVRI memiliki kepentingan yang sama, yaitu menjaga keberadaan, kehormatan, dan keberlanjutan organisasi veteran.

Frame dukungan Kemhan juga membangun hubungan emosional antara sejarah perjuangan veteran dan tanggung jawab kelembagaan masa kini (Baka et al., 2026). Veteran diposisikan sebagai bagian dari memori perjuangan bangsa yang tetap memiliki relevansi dalam kehidupan kenegaraan (Barmuddin et al., 2025; Silondae et al., 2025). Sementara itu, dukungan Kemhan dipresentasikan sebagai bentuk keberlanjutan hubungan antara institusi pertahanan dan organisasi veteran (Kritian & Herlia, 2025). Narasi tersebut memperkuat *shared motivation* karena kedua pihak dikonstruksikan memiliki kepentingan bersama dalam menjaga kehormatan dan keberlanjutan veteran (Aisjah et al., 2023).

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa hubungan antara LVRI dan Kemhan tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan administratif. Hubungan tersebut dibangun melalui kesamaan nilai yang bersumber dari sejarah perjuangan, pengabdian kepada negara, dan penghormatan terhadap veteran (Prasetyo, 2025; Satyadharma & Erfain, 2022).

Dalam perspektif framing, penekanan terhadap dukungan pemerintah menghasilkan moral evaluation yang positif. Pemerintah direpresentasikan sebagai institusi yang memiliki perhatian terhadap veteran, sementara LVRI ditempatkan sebagai organisasi yang legitimate untuk memperoleh dan mengomunikasikan dukungan tersebut (Barmuddin et al., 2026).

Dengan demikian, media internal tidak hanya melaporkan adanya dukungan, tetapi juga mengonstruksikan hubungan kelembagaan sebagai bentuk keberlanjutan tanggung jawab negara terhadap veteran. Narasi tersebut memperkuat legitimasi LVRI sekaligus membangun citra hubungan harmonis antara organisasi veteran dan pemerintah (Satyadharma et al., 2025).

TransJakarta dan Collaborative Action

Berita mengenai silaturahmi pimpinan DPP LVRI dengan Direktur Utama TransJakarta memperluas ruang collaborative governance. Kolaborasi tidak hanya ditempatkan pada wilayah legislasi atau kementerian, tetapi juga pada pelayanan publik (Sinaga, 2021). TransJakarta bukan lembaga yang secara khusus menangani veteran. Namun, keterlibatan TransJakarta dalam kegiatan LVRI menunjukkan bahwa kepentingan veteran dapat bersinggungan dengan berbagai sektor pelayanan publik (Devi et al., 2021). Frame yang dibangun adalah kolaborasi berbasis dukungan sumber daya (Saufi, 2021). LVRI memiliki kebutuhan dan agenda organisasi, sementara TransJakarta memiliki sumber daya pelayanan transportasi yang dapat mendukung kegiatan tersebut.

Dalam perspektif collaborative governance, kondisi ini dapat dikaitkan dengan *capacity for joint action*, yaitu kemampuan para aktor untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas kelembagaan untuk menghasilkan tindakan bersama (Rozie, 2023).

Kolaborasi dengan TransJakarta juga memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap veteran dapat diwujudkan melalui tindakan praktis dalam ruang pelayanan publik. Frame ini memperluas pemaknaan dukungan terhadap veteran dari kebijakan dan regulasi menuju penyediaan sumber daya konkret. Media internal LVRI dengan demikian mengonstruksikan kolaborasi sebagai tindakan yang menghasilkan manfaat langsung (Honna, 2013). Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai institusi publik dapat mengambil bagian dalam penghormatan veteran sesuai kapasitas, kewenangan, dan sumber daya masing-masing (Hamida, 2022).

Jika dikaitkan dengan model Entman, problem definition dalam pemberitaan ini tidak secara langsung berupa persoalan kesejahteraan atau regulasi. Sebaliknya, kebutuhan organisasi dan kegiatan veteran menjadi konteks yang membuka ruang bagi keterlibatan lembaga pelayanan publik. Treatment recommendation kemudian diwujudkan melalui dukungan praktis dan kerja sama antarlembaga (Siregar et al., 2025).

Pemberitaan tersebut sekaligus memperluas aktor dalam ekosistem collaborative governance. Pemerintah pusat dan lembaga legislatif bukan satu-satunya pihak yang dapat berkontribusi terhadap kepentingan veteran. Badan usaha atau institusi pelayanan publik juga dapat menjadi bagian dari jaringan kolaborasi ketika sumber daya yang dimilikinya relevan dengan kebutuhan veteran (Alfiandri et al., 2019; Bilqis et al., 2025).

Dengan demikian, kerja sama LVRI dan TransJakarta menunjukkan bahwa *collaborative governance* dapat berlangsung melalui bentuk tindakan yang sederhana tetapi memiliki makna simbolik

dan praktis. Dukungan pelayanan tersebut tidak hanya membantu pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memperkuat konstruksi bahwa penghormatan terhadap veteran dapat diwujudkan melalui partisipasi konkret berbagai institusi dalam ruang publik (Dahliyana et al., 2022).

Matriks Framing dan *Collaborative Governance*

Berikut Tabel Framing dan *Collaborative Governance* dari pemberitaan yang menjadi fokus penelitian.

Tabel 1 Matriks Framing dan *Collaborative Governance*

Berita	Frame Utama	Aktor	Dimensi Collaborative Governance	Konstruksi
Wamenkum mendukung revisi UU	Hak veteran membutuhkan penguatan regulasi	LVRI–Kemenkum–DPR	Dialog, komitmen, principled engagement	Kolaborasi kebijakan
Kemhan meningkatkan dukungan	Veteran membutuhkan dukungan kelembagaan	LVRI–Kemhan	Shared motivation, trust, commitment	Kolaborasi kelembagaan
LVRI–TransJakarta	Dukungan pelayanan bagi kegiatan veteran	LVRI–TransJakarta	Capacity for joint action, collaborative action	Kolaborasi pelayanan publik
Baleg menolak veteran diabaikan	Negara bertanggung jawab terhadap veteran	LVRI–DPR–Negara	Shared understanding, dialogue	Kolaborasi perlindungan hak

Sumber : Data diolah (2026)

Dari matriks tersebut terlihat bahwa keempat berita membentuk satu konstruksi yang relatif konsisten:

Persoalan veteran → artikulasi kepentingan oleh LVRI → dialog dengan institusi → respons institusi → komitmen kolaboratif → pemenuhan hak dan kepentingan veteran.

Dengan demikian, framing *collaborative governance* dalam media internal LVRI dapat dipahami sebagai **narasi tentang negara yang hadir melalui hubungan kolaboratif dengan organisasi veteran.**

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa media internal LVRI membingkai perjuangan hak veteran sebagai persoalan tanggung jawab negara yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi antarlembaga. Empat pemberitaan memperlihatkan pola konsisten berupa identifikasi masalah, artikulasi kepentingan, dialog kelembagaan, dukungan pemerintah, dan tindakan kolaboratif. LVRI dikonstruksikan bukan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai aktor advokasi, penghubung, dan penggerak kolaborasi. Framing tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak veteran membutuhkan keterlibatan legislatif, eksekutif, organisasi veteran, dan institusi pelayanan publik. Dengan demikian, media internal LVRI berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi, advokasi, dan penguatan tata kelola kolaboratif dalam memperjuangkan kepentingan veteran.

LVRI perlu memperkuat advokasi berbasis data, memperluas jejaring kolaborasi lintas lembaga, serta memastikan setiap dukungan diterjemahkan menjadi kebijakan dan pelayanan nyata. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan media internal dan eksternal LVRI untuk mengidentifikasi perbedaan framing, kepentingan, aktor, serta dinamika kekuasaan dalam isu veteran.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N., Sudartini, S., Anomsari, E. T., & Novira, A. (2026). *Collaborative Governance: Suatu Tinjauan Konseptual Model Collaborative Governance dan Implementasi Pencapaian SDGS pada Studi Intervensi Stunting di Pemerintah Daerah*. Deepublish.
- Aisjah, S., Thoyib, A., Wijayanti, R., & Prasetyo, H. (2023). *Military Participative Leadership (MPL): Konsep Gaya Kepemimpinan Militer Berorientasi Kinerja*. Universitas Brawijaya Press.

- Alfiandri, A., Akbar, D., & Ikhsan, K. (2019). *Collaborative Governance: Suatu Konsep Penguatan Kelembagaan Dalam Dunia Investasi*. Umrahpress.
- Ardiansyah, A., Kurniansyah, D., & Priyanti, E. (2025). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2173–2184. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2173-2184>
- Atmadja, N. B., & Ariyani, L. P. S. (2023). *Sosiologi Media: Perspektif Teori Kritis-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Awaluddin, S. (2026). *Collaborative Governance Culture (Model Penguatan Implementasi Kebijakan Publik)*. Penerbit Satu Indonesia.
- Baka, W. K., Rianse, U., Rajulan, M., Mursalim, S., Silondae, T. T. A., Sjachrawy, L. O. M. I., & Prasetyo, E. W. (2026). *Dari Sejarah Perjuangan Menuju Masa Depan Bangsa*. Luana Publishing House.
- Barmuddin, & Safitri, T. N. (2026). Kontribusi Veteran dalam Penguatan Karakter Generasi Muda dalam Mendukung Pembangunan Nasional (Studi di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Formasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 10–23. <https://ojs.brida.sultraprov.go.id/index.php/formasi/article/view/56>
- Barmuddin, Satyadharma, M., & Silondae, T. T. (2026). Framing Media dalam Peringatan HUT LVRI Tahun 2026: Veteran dan Solidaritas Bencana. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 5(2), 9–17. <https://doi.org/10.30998/rmztnk24>
- Barmuddin, Satyadharma, M., Silondae, T. T. A., & Safitri, T. N. (2025). Peran Veteran dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pemilihan Umum 2024 (Studi di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(02). <https://doi.org/10.70294/juperan.v4i02.1470>
- Bilqis, Z. A., Apriyanti, G., Andani, T., & Syahrani, E. M. (2025). Collaborative Governance As A Lever For Smart City Innovation:: An Analysis Of Digital Public Service Transformation In Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 10(2), 207–219. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/5728>
- Dahliyana, A., Budimansyah, D., & Nurdin, E. S. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Umum dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*. Indonesia Emas Group.
- Devi, M. K., Safitri, R., & Fanani, F. (2021). Peran Kebijakan dalam Peningkatan Performa Layanan BRT Transjakarta. *SPECTA Journal of Technology*, 5(3), 287–297. <https://doi.org/10.35718/specta.v5i3.373>
- Dharmawan, I. N. D., Siringoringo, P., & Silalahi, F. (2025). Peranan Kementerian Hukum Guna Penguatan Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9779–9791. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2730>
- El Yana, K. (2025). *The Governance Game: Strategi dan Taktik dalam Politik Pemerintahan*. Publica Indonesia Utama.
- Ghoezali, P. I. (2025). *Dari Aspirasi Menjadi Aksi: Mengawal Pemerintahan Daerah*. Detak Pustaka.
- Gillis, T. L. (2006). Internal Communication Media. In *The IABC Handbook of Organizational Communication* (pp. 257–267).
- Hamida, A. S. (2022). The Policy of Virginity Testing in the Indonesian Military from the Perspectives of Public Values and Control toward Bureaucratic Discretion. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 19(1), 78–94. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.846>
- Hidayat, R., & Prasetyo, F. H. (2023). Analisis Framing Robert N Entman Pada Berita Larangan Mudik 2021 di Media Detikcom dan Kompas. Com. *Journal Communication Lens*, 2(2), 1. <https://jurnal.uic.ac.id/Lens/article/view/174>
- Honna, J. (2013). *Military Politics and Democratization in Indonesia*. Routledge.
- Islamy H., L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Jamhur, N. (2024). *Collaborative Dynamics dalam Penanganan Stunting Melalui Program Ma'silambi Desa Duampanua Kabupaten Polewali Mandar*. Universitas Hasanuddin.
- Kritian, I., & Herlia, T. (2025). Penguatan Kelembagaan dalam Pembinaan Veteran: Studi Koordinasi Antara Kodam dan Direktorat Veteran Kementerian Pertahanan. *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan*, 2(1), 66–73.

- <https://ejournal.badiklat.kemhan.go.id/index.php/judiklathan/article/download/123/27>
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., & Martono, S. M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Widina.
- Mursalim, S., & Sulisty, G. A. (2026). Framing Media dan Pembentukan Opini Publik atas Hilangnya Tumbler Tuku. *Kandole (Kajian Dan Analisis Multidisiplin Layanan Edukasi)*, 2(1), 13–23. <https://journal.baktinusantarasultra.org/kandole/article/view/23>
- Prasetyo, D. I. (2025). *Negara dan Konstruksi Sosial*. Jakad Media Publishing.
- Purwanto, E., Riyantini, R., Oktarina, S., Primagara, M., Anggraeni, D., Sari, S. D. S. R., & Shahreza, M. (2025). *Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan*. Minhaj Pustaka.
- Putera, Z., Saepuddin, A., & Satyadharma, M. (2026). Peran Veteran Dalam Merawat Nasionalisme dan Semangat Kebangsaan. *Nusantara: Journal of Social Sciences & Humanities*, 1(1). <https://journals.edukasinusantara.com/njssh/article/view/31>
- Rozie, A. (2023). Kapasitas Pemerintahan dan Collaborative Governance dalam Penanganan Krisis COVID-19: Studi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Polpem: Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/1875>
- Satyadharma, M., & Anwar, M. T. S. (2025). Long March Andhika PPM Untuk Apresiasi Perjuangan Veteran Dalam Bingkai Media Online Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 6(2), 102–114. <https://doi.org/10.29303/y8t4wd06>
- Satyadharma, M., Barmuddin, B., NurSafitri, T., Putra, Z., & Kasim, S. S. (2025). Strategic Partnership between the Government and Veterans Organizations: A Case Study of PPM and LVRI in Southeast Sulawesi Province. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 42–49. <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/55>
- Satyadharma, M., & Erfain. (2022). Peran Veteran dalam Meningkatkan Semangat Nasionalisme Pada Masyarakat: Studi pada DPD LVRI Sulawesi Tenggara. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 117–127. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.85>
- Satyadharma, M., & Silondae, T. T. (2026). Framing Media dalam Peringatan Hut LVRI Tahun 2026: Veteran dan Solidaritas Bencana: Media Framing in the 2026 LVRI Anniversary Commemoration: Veterans and Disaster Solidarity. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 5(2), 9–17. <https://doi.org/10.30998/rmztnk24>
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1). <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/semnaspk/article/view/40>
- Silondae, T. T. A., Kasim, S. S., Satyadharma, M., Rachman, R. M., Almaliki, M. F., Mahdar, M., & Prasetyo, E. W. (2025). Sosialisasi Nilai Nasionalisme Melalui Televisi (Mengenang Sejarah Perjuangan Bangsa). *SMART HUMANITY: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.70427/sh.v2i1.185>
- Silondae, T. T. A., & Satyadharma, M. (2025). Keterlibatan Veteran Dalam Kebijakan Publik Partisipatif: Perspektif Collaborative Governance. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 5(1), 8–15. <https://newjournal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/517>
- Sinaga, R. M. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru*. <https://repository.uir.ac.id/17345/1/177310795.pdf>
- Siregar, I. A., Anrial, A., & Valentine, F. (2025). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Kompas.com dan Metrotvnews.com dalam Isu Politik Terhadap Polarisasi Pemilih dalam Pemilu 2024 (Edisi Januari 2024)*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Sudarsono, L. M. U. S. P., Sukawati, F., Satyadharma, I. M., Putra, Z., & Mardiansyah, E. B. (2026). *Jangan Lupakan Mereka: Warisan Semangat Juang Para Veteran*. LSO Creative.
- Suwarlan, E. (2026). *Proses Legislatif di Indonesia*. CV Eureka Media Aksara.
- Udin, U. (2026). *Analisis Framing Media Online Lokal dan Nasional dalam Memberitakan Isu Pertambangan di Maluku*. Universitas Hasanuddin.
- veteranri.go.id. (2026a). Anggota Baleg DPR RI Tidak Terima Kalau Nasib Veteran RI Diabaikan Oleh Negara. *Veteran RI*. <https://veteranri.go.id/anggota-baleg-dpr-ri-tidak-terima-kalau-nasib-veteran-ri-diabaikan-oleh-negara/>
- veteranri.go.id. (2026b). Kabacadnas Janji Kemhan Akan Tingkatkan Dukungan Kepada LVRI. *Veteran RI*. <https://veteranri.go.id/kabacadnas-janji-kemhan-akan-tingkatkan-dukungan-kepada-veteran-ri/>

- lvri/
veteranri.go.id. (2026c). Pimpinan DPP LVRI Silaturrahim Kepada Dirut Transjakarta. *Veteran RI*.
<https://veteranri.go.id/pimpinan-dpp-lvri-silaturrahim-kepada-dirut-transjakarta/>
veteranri.go.id. (2026d). Wamenkum RI Dukung Percepatan Usulan Revisi UU Veteran RI. *Veteran RI*.
<https://veteranri.go.id/wamenkum-ri-dukung-percepatan-usulan-revisi-uu-veteran-ri/>
veteranri.go.id. (2026e). *Website Legiun Veteran Republik Indonesia*. Veteran RI.
<https://veteranri.go.id/>
Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N.
(2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.